

JURNAL

Ekonomi DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (JEPP)

Volume: 4. NO. 02, JULI - DESEMBER 2011



ISSN 1979-7338

THE ANALYSIS OF GOVERNMENT EXPENDITURE AND
ECONOMIC GROWTH OF REJANG LEBONG REGENCY
Marlenti, Mochamad Ridwan, Purmini

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN
PELAKSANAAN PROGRAM "MURA BERPIJAR 2010"
KABUPATEN MUSI RAWAS, PROVINSI SUMATERA SELATAN
Teddy Laszuardy, Handoko Hadiyanto, Aris Almahmudi

ANALISA INDIKATOR KEMISKINAN PEDESAAN
DI PROVINSI BENGKULU 2008
Endang Trisilowati, Heri Sunariyanto, Yusnida

ANALISIS POTENSI HASIL LAUT
SEBAGAI DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR KELAUTAN
DI KABUPATEN KAUR
M. Yunus, Retno A Ekaputri, Purmini

ANALISIS WILLINGNESS TO PAY (KESEDIAN MEMBAYAR)
PASIE TERHADAP PELAYANAN BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN
PROPINSI BENGKULU
Faradilla Sari, Muhamad Abduh, Bambang Agoes.H

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI PROVINSI BENGKULU
Gusti Eryandi, Lizar Alfansi, Benardin

STRATEGI PENGEMBANGAN PELAYANAN TERPADU
PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU PERIZINAN KABUPATEN MUSI RAWAS
Deni Herdian, Ridwan Nurazi, M.Rusdi

ANALISIS KONSUMSI MASYARAKAT PROVINSI BENGKULU
TAHUN 1986-2008
Chahyetty Septia, Sigit Nugroho, BIE. Indraswanti

**PENERBIT PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BENGKULU
Gedung S Jln. Raya Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
Telp 0736 - 28481 Fax: 0736 - 28481 email: mpp_feunib@yahoo.com**

JURNAL
EKONOMI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Vol. 4 NO. 02 JULI - DESEMBER 2011

ISSN: 1979-7338

THE ANALYSIS OF GOVERNMENT EXPENDITURE AND ECONOMIC GROWTH OF
REJANG LEBONG REGENCY

Marlenti, Mochamad Ridwan, Purmini 1-7

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN PELAKSANAAN PROGRAM
”MURA BERPIJAR 2010” KABUPATEN MUSI RAWAS, PROVINSI SUMATERA SELATAN

Teddy Laszuardy, Handoko Hadiyanto, Aris Almahmudi 8-14

ANALISA INDIKATOR KEMISKINAN PEDESAAN DI PROVINSI BENGKULU 2008

Endang Trisilowati, Heri Sunariyanto, Yusnida 15-21

ANALISIS POTENSI HASIL LAUT SEBAGAI DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SEKTOR KELAUTAN DI KABUPATEN KAUR

M. Yunus, Retno A Ekaputri, Purmini..... 22-27

ANALISIS WILLINGNESS TO PAY (KESEDIAN MEMBAYAR) PASIEN TERHADAP
PELAYANAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN
PROPINSI BENGKULU

Faradilla Sari, Muhamad Abduh, Bambang Agoes.H 28-36

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI BENGKULU

Gusti Eryandi, Lizar Alfansi, Benardin..... 37-44

STRATEGI PENGEMBANGAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN PADA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN KABUPATEN
MUSI RAWAS

Deni Herdian, Ridwan Nurazi, M.Rusdi..... 45-52

ANALISIS KONSUMSI MASYARAKAT PROVINSI BENGKULU TAHUN 1986-2008

Chahyetty Septia, Sigit Nugroho, BIE. Indraswanti 53-60

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI PROVINSI BENGKULU**

By:
Gusti Eryandi, Lizar Alfansi, Benardin

ABSTRACT

This study aimed: 1) to know the effectively of imposition of tax vehicle and resale tax vehicle in Bengkulu Province; 2) to know of the strategy to improving of PAD in Bengkulu Province; and 3) to know of the factors threat to improving of PAD in Bengkulu City. The data analysis methods were descriptive analysis and SWOT analysis. The results of the data analysis show that first, the collection of tax vehicle and resale vehicle tax in Bengkulu Province on the bad level. Second, the strategy of the collection of vehicle tax and resale vehicle tax in Bengkulu Province is tight of sanction and repaired of administration system. Third, the factors was threat the collection of vehicle and resale tax in Bengkulu Province is the low level of sanction and others.

Key words: Effectivity, vehicle tax and resale vehicle tax

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui efektifitas pengenaan pajak kendaraan dan dijual kembali pajak di Provinsi Bengkulu, 2) untuk mengetahui strategi untuk meningkatkan PAD di Provinsi Bengkulu, dan 3) untuk mengetahui faktor-faktor ancaman untuk meningkatkan dari PAD di Kota Bengkulu. Metode analisis data adalah analisis deskriptif dan analisis SWOT. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pertama, pengumpulan pajak dan penjualan kembali kendaraan pajak kendaraan di Provinsi Bengkulu pada tingkat yang buruk. Kedua, strategi pengumpulan pajak kendaraan dan pajak penjualan kembali kendaraan di Provinsi Bengkulu ketat sanksi dan diperbaiki dari sistem administrasi. Ketiga, faktor-faktor itu ancaman koleksi kendaraan dan pajak penjualan di Provinsi Bengkulu adalah rendahnya sanksi dan lain-lain.

Kata kunci: Efektivitas, pajak kendaraan dan pajak penjualan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Provinsi Bengkulu sebagai salah satu daerah otonom harus berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai modal pembangunan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah, yang masih memiliki peluang dan potensi untuk ditingkatkan. Hal ini terlihat dari kontribusi dan realisasi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah selama enam tahun yakni pada Tahun 2002 s/d Tahun 2007 sebagaimana terlihat pada

Tabel 1.1 berikut ini. Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusinya terhadap PAD dan Kontribusi PAD terhadap APBD Prov. Bengkulu Tahun 2002-2007.

Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Pendapatan dan Anggaran Belanja

Daerah (APBD) total selama enam tahun (Tahun 2002-2007) adalah sebesar 29,19 persen, atau dapat dikatakan bahwa kontribusi PAD terhadap APBD rata-rata sebesar 29,19 persen per tahunnya. Sedangkan rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bengkulu per tahunnya adalah sebesar 67,66 persen. Kondisi ini cukup memadai dan masih memiliki potensi untuk terus ditingkatkan di masa mendatang. Berdasarkan data tersebut juga diketahui bahwa pajak daerah merupakan komponen utama penyumbang terbesar APBD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu. Walaupun demikian, penerimaan daerah dari sumber-sumber lain juga tidak boleh dikesampingkan dan harus terus digali baik potensi maupun sumbernya.

Jika dilihat secara parsial, komponen pajak daerah dua di antaranya adalah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBN-KB)

di Provinsi Bengkulu memiliki potensi dan masih memberikan peluang yang cukup besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor selama 6 (enam) tahun yakni Tahun 2002 – 2007 masih memberi ruang dan potensi untuk terus ditingkatkan.

Potensi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu selama lima tahun terakhir ini, masih memungkinkan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak ini. Berdasarkan laporan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2007, realisasi pajak KB dan BBN-KB baru sebesar 52,41 persen. Artinya masih terdapat 47,59 persen potensi pajak KB dan BBN-KB di Provinsi Bengkulu belum terealisasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PBK) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana upaya/strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PBK) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PBK) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Provinsi Bengkulu?

Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PBK) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
2. Mengetahui upaya/strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PBK) dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Provinsi Bengkulu.

3. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Provinsi Bengkulu.

KAJIAN PUSTAKA

Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional harus mendapatkan perhatian yang serius dalam memacu pembangunan kepada tujuan pembangunan nasional. Peran pemerintah sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk menjalankan kekuasaan melalui tindakan-tindakan dalam masyarakat memegang peranan yang cukup penting sebagai penggerak roda pertumbuhan ekonomi. Campur tangan pemerintah untuk pembangunan secara nasional termasuk pembangunan di daerah mempunyai manfaat yang tinggi, di samping mencegah jurang kemakmuran antar daerah, melestarikan kebudayaan setempat, dapat juga menghindarkan perasaan tidak puas masyarakat. Walaupun demikian tidak selamanya campur tangan pemerintah menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan secara sistematis senantiasa terjadi kegagalan pemerintah (*government failures*) (Mangkoesobroto, 1998: 50). Untuk melakukan campur tangan dalam perekonomian pemerintah memerlukan dana agar fungsifungsi pemerintah dapat terealisasi dengan baik, sehingga pemerintah harus memiliki penerimaan untuk membiayai pengeluarannya.

Keberhasilan pembangunan identik dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu wilayah. Konsep pemikiran bahwa pembangunan bertumpu pada pertumbuhan merupakan suatu paradigma yang memiliki alasan bahwa dalam mengejar ketinggalan dari negara industri maju, maka negara berkembang harus melipat gandakan pertumbuhan ekonominya dan pertumbuhan ekonomi yang dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan apabila tingkat kegiatan ekonomi masyarakat lebih tinggi dari kegiatan ekonomi yang dicapai pada masa sebelumnya (Sukirno, 1999:19). Menurut Boediono

(1981:1) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses karena proses mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan sehingga akan menekankan waktu yang cukup lama.

Keuangan Daerah

Devas *at.all* (1999:59) menyatakan bahwa bagi Daerah Tingkat II (kabupaten/kota), pajak daerah merupakan pos pendapatan kedua terbesar di dalam PAD setelah retribusi daerah. Namun bagi Kota Dumai penerimaan pajak menduduki peringkat teratas dari penerimaannya terhadap PAD yaitu rata-rata mencapai 52,3% per tahun, sedangkan retribusi daerah mencapai rata-rata 45,9% per tahun.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Purwodarminto (dalam Irwanto, 2008) yang dimaksud dengan pendapatan adalah perolehan atau hasil guna dari suatu pencaharian. Sedangkan pendapatan asli daerah adalah sejumlah uang atau dana yang diperoleh dari usaha daerah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sesuai UU No.25 tahun 1999 terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004, pada bab VIII pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu (a) hasil pajak daerah, (b) hasil retribusi daerah, (c) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) dana perimbangan, (3) pinjaman daerah dan (4) lain-lain pendapatan yang sah.

Ketentuan ini merupakan ketentuan yang pokok yang kemudian dilanjutkan dengan ketentuan pasal 80, yang menyatakan bahwa dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 terdiri atas: (1) bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam, (2) dana alokasi umum dan, (3) dana alokasi khusus ketentuan lebih lanjut perihal dana perimbangan diatur dalam undang-undang No. 25 tahun 1999.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan PAD dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- 1 Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah hal ini ditandai dengan rendahnya sumbangan bagian laba BUMD terhadap total pendapatan daerah dan inefisiensi tercermin dari kecilnya laba bersih (*Net Profit*) yang dihasilkan sehingga kontribusi pada PAD kecil.
- 2 Tingginya sentralisasi dalam perpajakan, di mana semua pajak utama yang produktif di daerah ditarik oleh pusat.
- 3 Infrastruktur yang kurang memadai sehingga pemerintah daerah sulit mengalih sumber-sumber yang ada seperti banyak objek wisata yang belum dieksploitasi secara maksimal mendukung pendapatan asli daerah.
- 4 Rendahnya pendapatan per kapita masyarakat berdampak pada lemahnya penegak aturan khususnya PERDA pajak dan retribusi.

Derajat otonomi fiskal daerah juga menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah, dan lain-lain. Oleh karena itu otonomi daerah dalam pemerintah serta pembangunan daerah bisa diwujudkan apabila disertai otonomi keuangan. Menurut Widayat, dkk (1994:32) ada beberapa cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yakni dengan cara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber penerimaan daerah.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah merupakan salah satu sumber pendapatan yang diandalkan oleh daerah baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah atau pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah

pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Menurut Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 2009, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian 2 (dua) unsur pokok, yakni nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah NJKB (nilai jual kendaraan bermotor). Pajak kendaraan bermotor dikenakan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut setiap tahunnya. Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan STNK dan perpanjangannya wajib dilakukan setiap tahunnya.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Subjek pajak BBN-KB adalah orang pribadi atau barang yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib pajak BBN-KB wajib mendaftarkan penyerahan KB dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan. Penguasaan kendaraan melebihi 12 (dua belas) bulan di luar perjanjian sewa beli dapat dianggap sebagai penyerahan. Pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.

Studi Empiris

Beberapa penelitian mengenai pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap peningkatan PAD dan serta strategi dalam meningkatkan penerimaan PKB telah cukup banyak dilakukan. Susi Hardjati (2008) telah melakukan penelitian dengan judul “Strategi Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Timur” berhasil mengidentifikasi dan menemukan strategi dalam meningkatkan

penerimaan pajak kendaraan bermotor seperti pengetatan sanksi dan perbaikan sistem administrasi perpajakan.

Sementara itu, Feni Felia (2006) telah membuktikan bahwa peranan subsektor pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat sangat besar. Sedangkan Zulhelmi (2001) meneliti tentang Pengaruh PDRB/kapita, jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau tahun 1981 s/d 2000. Hasil penelitian memberikan informasi PDRB/kapita, jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan jumlah kendaraan bermotor berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan dan menguraikan tentang suatu keadaan yang berhubungan permasalahan yang akan diteliti. Deskriptif (*descriptif research*) adalah meneliti dan berusaha untuk mendapatkan data yang aktual dan akurat, dimana data tersebut kemudian di bahas dan diuraikan secara sistematis serta disimpulkan untuk mendapatkan pemecahan dari masalah yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara dilakukan kepada 10 orang wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk menggali informasi-informasi mengenai permasalahan yang diteliti, terutama menyangkut pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya.
2. Studi Dokumentasi Pengumpulan dan pengambilan data dilakukan dengan cara mencatat, memfotokopi data-data publikasi dan laporan instansi terkait dengan permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Walaupun dari tahun ke tahun jumlah kendaraan bermotor roda empat (mobil)

mengalami peningkatan, namun jika dipersentasekan justru mengalami penurunan. Hal ini terlihat pada Tahun 2007 jumlah kendaraan bermotor roda empat sebanyak 35.929 unit hanya 12,95 persen. Kenyataan ini terjadi karena terjadi peningkatan luar biasa jumlah kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) yang mencapai 241.420 unit atau sebesar 87,05 persen.

Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Analisis efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor digunakan untuk mengukur proporsi antara realisasi penerimaan pajak dengan target atau potensinya di Provinsi Bengkulu yang bertujuan untuk mengetahui apakah pemungutan PKB dan BBN-KB telah efektif

Tabel 4.3 Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Bengkulu Tahun 2008

No	Objek Pajak Daerah	Target	Realisasi	Efektivitas (%)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	87.516.500.000,	46.009.952.000,	52,57
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	120.798.668.603,	62.323.110.500,	51,59
Jumlah		208.315.168.603,	108.333.062.500,	52,08

Sumber : Laporan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, 2008

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa pemungutan PKB dan BBN-KB Tahun 2008 tidak efektif. Hal ini terlihat dari nilai koefisien efektivitas rata-rata kedua objek pajak tersebut sebesar 52,08 persen berada pada interval 40% -60% (Depdagri dalam Herman, 2001).

Faktor-faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Hambatan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Jika dibandingkan antara kekuatan

dengan kelemahan dan peluang dengan ancaman maka efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu.

Ringkasan Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman pada Efektivitas Pemungutan PKB dan BBN-KB di Provinsi Bengkulu

SWOT Kegiatan	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman	Total
Pendaftaran	3	5	3	4	15
Penetapan Pajak	3	3	1	4	11
Penyetoran Pajak	2	6	3	3	14
Penagihan Pajak	2	3	2	2	9
Jumlah	10	17	9	13	49

Sumber : Data diolah, 2010

Dari tabel di atas dapat diketahui total skor dan kebijakan yang semestinya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

- Peluang -Ancaman yang dimiliki yaitu $9 - 13 = -4$
- Kekuatan -Kelemahan yang dimiliki yaitu $10 - 17 = -7$

Berdasarkan data-data di atas, diketahui bahwa posisi efektivitas kegiatan usaha pemungutan PKB dan BBN-KB di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini.

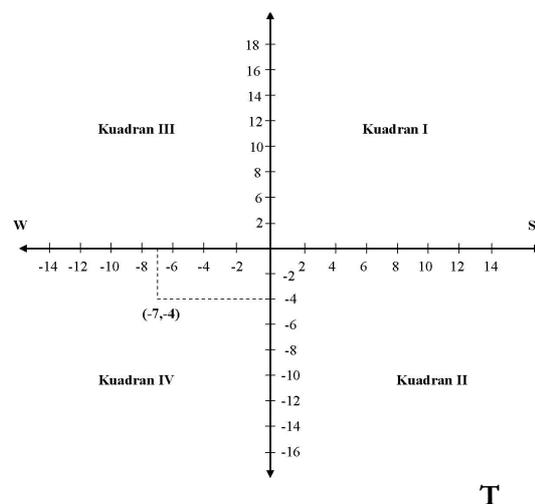


Diagram Cartesius Efektivitas Pemungutan PKB dan BBN-KB Di Provinsi Bengkulu

Jika dilihat dari Gambar 4.1 di atas, posisi efektivitas usaha pemungutan PKB dan BBN-KB di Provinsi Bengkulu berada pada Kuadran IV. Pada kuadran ini menghadapi kondisi yang paling buruk karena harus menghadapi tantangan besar yang bersumber pada lingkungan internal dan lingkungan eksternal pada waktu yang bersamaan.

Pembahasan

Strategi Meningkatkan Penerimaan Pajak KB dan BBN-KB

Berdasarkan analisis SWOT dapat dirumuskan kembali secara spesifik strategi pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

S-O Strategy

- 1) Meningkatkan Sarana dan Prasarana terutama tempat-tempat pembayaran PKB dan BBN-KB.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak.
- 3) Melakukan kerja sama lintas sektor untuk mengoptimalkan pemungutan PKB dan BBN-KB.
- 4) Memperbaiki sistem administrasi perpajakan. 5) Menerapkan sistem jemput bola

W-O Strategy

- 1 Menyediakan/menambah petugas teknis pemungut yang profesional di setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan PKB dan BBN-KB
- 2 Menerapkan peraturan daerah yang tegas serta tidak membingungkan masyarakat pemilik kendaraan bermotor
- 3 Membuka tempat-tempat loket pembayaran PKB dan BBN-KB yang mudah dijangkau oleh WP
- 4 Menetapkan biaya administrasi yang murah (bila perlu gratis) untuk WP yang menunggak pajak

S-T Strategy

1. Menetapkan syarat pembayaran PKB dan BBN-KB yang tidak memberatkan wajib pajak
2. Pengetatan sanksi berdasarkan peraturan perundangan
3. Membentuk tim terpadu yang profesional dalam pengelolaan PKB dan BBNKB dengan melibatkan instansi-instansi terkait

4. Transparansi terhadap tarif pajak dan sanksi jika WP terlambat membayar pajak
5. Menerapkan sanksi yang tegas dan jelas sesuai unsur-unsur keadilan

W-T Strategy

1. Membebaskan biaya administrasi pemungutan PKB dan BBN-KB bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB dan BBN-KB
2. Melakukan pemutihan terhadap kendaraan bermotor yang telah menunggak pajak lama sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai syarat-syarat pembayaran PKB dan BBN-KB

Faktor-faktor Kendala dan Mengatasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan strategi meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu adalah : 1) sanksi hukum yang kurang tegas bagi wajib pajak dan 2) kualitas SDM yang terbatas terutama untuk tenaga operasional. Brooks (2001) menggambarkan bahwa kesulitan dalam pemenuhan kepatuhan perpajakan karena terdapat perbedaan penting antara hukum pajak dengan hukum yang lain, yaitu untuk dapat mematuhi hukum pajak penduduk harus berhadapan dengan kompleksitas aturan dan bahkan serangkaian aktivitas yang membutuhkan biaya yang tinggi. Untuk itu, kebijakan harus memilih di antara dua alasan utama yaitu penerapan keadilan yang dapat menyebabkan peraturan perpajakan yang kompleks atau mengurangi biaya kepatuhan dengan penyederhanaan peraturan dan prosedur.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia aparatur pajak yang kurang baik dari sisi kualitas maupun kuantitas serta terbatasnya tenaga operasional juga menjadi kendala kelancaran dalam pemberian pelayanan kepada para wajib pajak. Hal ini diungkapkan oleh Vazquez (dalam Nasucha, 2004) bahwa kelemahan sistem perpajakan yang umumnya terjadi biasanya ditandai dengan prosedur yang sudah usang, pegawai yang dibayar rendah, pegawai yang kurang terlatih, sistem perpajakan yang terlalu kompleks sehingga sulit untuk mencapai efisiensi administrasi dengan sumber

daya yang tersedia sangat minim bagi kantor pelayanan pajak, keengganan pemerintah untuk menegakkan sistem yang ada dan cenderung hanya menunggu bola.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu berjalan tidak efektif.
2. Strategi-strategi pemungutan pajak yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penerimaan PKB dan BBN-KB adalah dengan cara pengetatan sanksi dan perbaikan sistem pemungutan pajak ke prosedur yang lebih sederhana dan mudah.
3. Faktor-faktor yang menjadi penghambat usaha pemungutan PKB dan BBNKB di Provinsi Bengkulu adalah : sanksi hukum yang kurang tegas, sanksi hanya bersifat administratif dan tidak ada sanksi pidana, kualitas dan kuantitas personil perpajakan yang terbatas, sistem pemungutan menggunakan sistem menunggu bola, kantor kas terbatas dan lokasinya relatif jauh, tarif pajak yang dirasakan terlalu tinggi, dan sebagainya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, beberapa saran yang direkomendasikan adalah dalam hal pengetatan sanksi, sebaiknya pengelola PKB dan BBN-KB melakukan upaya penegakan hukum yang tegas, memberikan tindakan pidana

1. yang menyangkut harta kekayaan melalui penahanan dan hukuman penjara bagi wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajaknya.
2. Perlu juga melakukan perbaikan sistem administrasi perpajakan mulai dari penyederhana prosedur dan sistem serta pengelolaan pajak yang efisien, meningkatkan kualitas SDM aparat pajak dengan melakukan pelatihan secara berkesinambungan, serta menciptakan jaringan pelaksana pungutan PKB dan BBN-KB sampai tingkat pemerintahan terendah (desa).

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2008 *Laporan Realisasi Penerimaan*

- PAD Provinsi Bengkulu*, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu
- Arsyad, Lincolin, 1999. *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi daerah*, BPFE, Yogyakarta.
- Boediono, 1981. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Davey, J, Edward, 1998. *Planning Lokal Economic Development*, SAGE Publication, Second Edition.
- Devas, N. Binder, *et.all*, 1999. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Feni Felia, 2008. Pengaruh Nilai Tambah Sektor Pedagangan, Hotel, dan Restoran, serta Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman, www.anekajurnal.com
- Herman, Y.K., 2001. *Efektivitas Pengelolaan Bahan Tambang*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Irwanto, Heru, 2008. Potensi, Efektivitas, dan Efisiensi Pengelolaan Pajak Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kepahiang, *Tesis Program Magister Perencanaan Pembangunan*, Universitas Bengkulu, tidak dipublikasikan.
- Kaho, Riwu, 1991. *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Kuncoro, H., 1995. *Perpajakan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lalins, D.K. Jr., 1995. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta
- Mangkoesebroto, S., 1998. *AKIP dan Pengukuran Kinerja*, Bahan Ajar Diklat PIM III, Lembaga Administrasi Negara-RI
- Mardiasmo dan Makhfatih, 2000. *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Usaha Meningkatkan PAD*, Modul Kursus Keuangan Daerah, FEUGM, Yogyakarta.
- Muhi, dkk, 2000. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Yogyakarta.
- Nazir, Muhammad, 1998. *Metodolgi Penelitian*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, J. Setiadi, 2000. *Ekonomi Moneter*, BPFE, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 *tentang Sistem Ketatanegaraan berkaitan dengan Otonomi Daerah*, Sekretariat

- Negara RI, Jakarta.
- Salusu, J., 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Non Profit*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sukirno, Sadono, 1999. *Teori Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta
- Susi Hardjati, 2008. Strategi Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Universitas Tujuh Belas Agustus*, Desember 2008
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*, Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Sumber Pendapatan Daerah*, Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 *tentang Pajak Daerah*, Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Widayat, Wihana Kirana J, Purwanto, Abdul Halim, John Supriyanto, Budi Purnomo, 1994. "Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Usaha meningkatkan PAD" Modul Kursus Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Zulhemi, 2001. Pengaruh PDRB/kapita, jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau, *Tesis Program Pascasarjan UGM*, tidak dipublikasikan